



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur





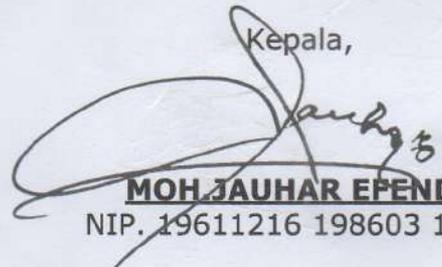
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha esa, karena hanya atas perlindungan dan petunjuk-NYA jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 diharapkan dapat mendorong transparansi perjanjian kinerja dan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini akan memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Kepala,



MOH. JAUHAR EPENDI
NIP. 19611216 198603 1 014



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan fenomena yang berkembang belakangan ini. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh realisasi kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat.

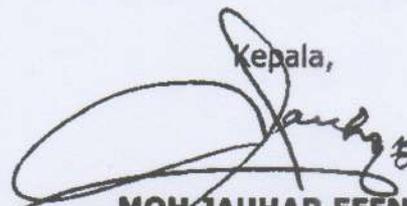
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang selama tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.

Untuk tahun 2019 kinerja yang dinilai dalam LkjIP berjumlah 1 (satu) Sasaran Strategis , dengan 6 (Enam) indikator kinerja utama yang diungkit dengan 13 (Tiga belas) Program dan 25 (Dua puluh lima) kegiatan dengan nilai capaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target, namun dapat diatasi dengan baik sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan. Dimana pada tahun 2019 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran disemua program kegiatan. Berada dalam kondisi ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau pencapaian target yang maksimal.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 ini dapat menjadi tolok ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Kepala,



MOH. JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desaprovinci Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

- Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian keijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;



5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan dan sosial budaya masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

C. Struktur Organisasi

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - b. Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
- 4) Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.
- 5) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 6) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

D. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 78 pegawai yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Pegawai Negeri Sipil Daerah | : | 46 orang |
| b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) | : | 0 orang |
| c. Non PTT | : | 32 orang |



Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 2019 :

No	Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
	a. Pembina Utama Madya (golongan IV/d)	1
	b. Pembina Tingkat I (golongan IV/b)	5
	c. Pembina (golongan IV/a)	8
	d. Penata Tingkat I (golongan III/d)	18
	e. Penata (golongan III/c)	3
	f. Penata Muda Tingkat I (golongan III/b)	6
	g. Penata Muda (golongan III/a)	1
	h. Pengatur Tingkat I (golongan II/d)	3
	i. Pengatur (golongan II/c)	0
	j. Pengatur Muda Tingkat I (gol. II/b)	0
	k. Pengatur Muda (golongan II/a)	1
	l. Juru Tk.I (golongan I/d)	0
	Jumlah	46
2	Menurut Tingkat Pendidikan	
	a. Doktor (S3)	1
	b. Pasca Sarjana (S2)	13
	c. Sarjana (S1)	28
	d. Sarjana Muda (D3)	0
	e. SLTA	4
	f. SLTP	0
	g. SD	0
	Jumlah	46
3	Menurut Gender	
	a. Laki-Laki	25
	b. Perempuan	21
	Jumlah	46



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	1	3	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	1	2		3	-	-	0	3	-	-	-	-
Kasi	7	5	6	7	-	-	6	4	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	14	11	2	18	4	0	2	21	0	4	0	0
Jlh Honor/ PTT	18	14	-	-	-	-	-	26	3	3	0	0
Jlh PNS + Honor/PTT	43	35	14	28	4	0	14	54	3	7	0	0



E. Aspek Strategis Organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun aspek strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mencakup :

- a. Peningkatan Peran lembaga usaha ekonomi masyarakat melalui peningkatan BUMDes
- b. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa
- c. Pembinaan kapasitas Pemerintahan desa
- d. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan.
- e. Penguatan ketangguhan desa dalam mengahdapi bencana dan perubahan iklim melalui pembinaan dan pengembangan desa/kampung rendah emisi

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam adalah sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Beberapa hal yang menjadi masalah atau penyebab dari permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
2. Belum optimalnya peningkatan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa
3. Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik
4. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa
5. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan kawasan perdesaan
6. Masih tingginya Emisi GRK



G. Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia sarana dan prasarana kerja pendukung sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	8.228	M2
2	Gedung	3	Unit (3 lantai)
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	jaringan
5	Telepon	2	jaringan
6	Area Parkir	3	area
7	Ruang Rapat	2	ruang
8	Taman	1	area
9	Masjid	1	unit

(Daftar Terlampir)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. V i s i

“ Berani untuk Kalimantan Timur berdaulat ”

2. M i s i

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dituju oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan wilayah Perdesaan secara merata



5. Strategi

1. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat
2. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa
3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun desa berkualitas
4. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif
5. Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

6. Kebijakan

1. Peningkatan Bumdes yang aktif untuk meningkatkan ekonomi desa
2. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa untuk mencapai status desa berkembang
3. Pembinaan kapasitas desa yang memiliki konsistensi perencanaan dan anggaran
4. Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
5. Pembinaan dan pengembangan Desa/Kampung rendah emisi.

7. Program dan Kegiatan

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 1. Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah
- 4). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 1. Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan
 2. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
 3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat
 4. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat



- 6). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 1. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
- 7). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 8). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
 1. Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- 9). Program peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 1. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat.
- 10). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 1. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan keluarga dan Pelestarian nilai nilai Kegotong – royongan.
 2. Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga.
 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga.
 4. Pengembangan dan Monitoring Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan.
- 11). Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- 12). Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Monitoring Penyaluran Keuangan Desa
 3. Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 13). Program Pembangunan Desa dan Kawasan
 1. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa
 2. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa
 3. Penguatan Informasi Pembangunan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Capaian s.d Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	518	15	25	30	35	45
		2 BUMDesa yang Aktif		2 Jumlah BUMDES yang Aktif (Bumdesa)	Bumdes	320	15	25	30	35	45
				1 Jumlah Bumdesa yang aktif	Bumdes		15	15	15	15	15
		3 Desa dengan status berkembang berkembang		3 Jumlah Desa dengan status berkembang	Desa	289	15	25	30	35	45
				1 Kabupaten yang dibina	Kabupaten		5	5	5	5	5
				2 Pendamping desa yang dibina	Orang		50	50	50	50	50
				3 Tercapainya Penguatan pengembangan dan pembanunan antar desa	Laporan		1	1	1	1	1
				4 Tercapainya data dan informasi pembangunan desa dan antar desa	Laporan		1	1	1	1	1
		4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan		4 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	Desa	323	15	25	30	35	45
				1 Data aparaturnya desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas	Kab/Kota		10	10	10	10	10
				2 Data Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan desa	Kabupaten		7	7	7	7	7
				3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kab/Kota		10	10	10	10	10
		5 Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang aktif		5 Jumlah Peningkatan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Desa	323	15	25	30	35	45
				1 Jumlah Pelaksanaan BBGRM	Kab/Kota		10	10	10	10	10
				2 Jumlah PKK yang dibina	PKK		10	10	10	10	10
	3 Jumlah LPM yang dibina	LPM		10	10	10	10	10			
	4 Jumlah Posyandu yang dibina	Posyandu		6	6	6	6	6			

		5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	Orang		150	150	150	150	150
		6 Jumlah MHA yang dibina	MHA		5	5	5	5	5
6 Jumlah Kampung/desa Iklim (Desa)		6 Jumlah Kampung/desa Iklim (Desa)	Desa	0	15	40	70	105	150
		1 Jumlah kampung Iklim + yang terbentuk							

Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<p>1 Persentase BUMDesa Aktif</p> <p>1 Jumlah Bumdesa yang Aktif</p>	<p>Bumdes</p> <p>Bumdes</p>	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
			<p>2 Persentase Desa dengan status berkembang</p> <p>1 Kabupaten yang dibina</p> <p>2 Pendamping desa yang dibina</p> <p>3 Tercapainya Penguatan pengembangan dan pembanqunan antar desa</p> <p>4 Tercapainya data dan informasi pembangunan desa dan antar desa</p>	<p>Desa</p> <p>Kabupaten Orang</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	<p>1 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa</p> <p>2 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa</p> <p>3 Penguatan Informasi Pembangunan</p>
			<p>3 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan</p> <p>1 Data aparaturn desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas</p> <p>2 Data Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan desa</p> <p>3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019</p>	<p>Desa</p> <p>Kab/Kota</p> <p>Kabupaten</p> <p>Kab/Kota</p>	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<p>1 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2 Monitoring Penyaluran Keuangan Desa</p> <p>3 Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p>

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			4 Persentase Peningkatan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 1 Jumlah Pelaksanaan BBGRM 3 Jumlah LPM yang dibina 4 Jumlah Posyandu yang dibina 5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina 6 Jumlah MHA yang dibina	Desa Kab/Kota LPM Posyandu Orang MHA	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Pengembangan Kapasitas Masyarakat 3 Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya
			5 Persentase Desa yang menjadi kampung iklim 1 Jumlah kampung Iklim + yang terbentuk	Desa	Program Kampung Iklim	1 Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi rendah Desa/Village Low Emissin Development (VLED)

B Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang akan ditingkatkan statusnya menjadi desa berkembang	Indeks Desa Membangun (IDM)	DPMPD Prov.Kaltim
		2 Persentase Bumdesa Aktif	Jumlah Bumdesa yang akan diaktifkan pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menjadi sasaran $\frac{\text{Jumlah Bumdesa aktif pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang UEM dan TTTG
		3 Persentase Desa dengan status berkembang	Target Jumlah desa berkembang $\frac{\text{Target Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
		6 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang UEM dan TTTG

C PERJANJIAN KINERJA

SASARAN					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4		
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 15		
	2 Jumlah BUMDesa yang aktif (Bumdes)	BUMDesa	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 15		
	1 Jumlah BUMDesa yang aktif				
	3 Jumlah desa dengan status berkembang		Kabupaten	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 2 TW 4 : 3	
	1 Kabupaten yang dibina				
	2 Pendamping desa yang dibina	Orang		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 50 TW 4 : 0	
	3 Tercapainya penguatan pengembangan dan pembangunan antar desa	laporan		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1	
	4 Tercapainya data dan informasi pembangunan antar desa	Laporan		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1	
	4 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan	Kab/Kota		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 10	
	1 Data aparaturnya desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan yang belum dilakukan peningkatan kapasitas				
	2 Data penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan desa		Kabupaten	TW 1 : 7 TW 2 : 7 TW 3 : 7 TW 4 : 7	
	3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan desa/kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019		Kab/Kota	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 10	
	5 Jumlah Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif		Kab/Kota	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 4	
	1 Jumlah pelaksanaan BBGRM yang dina				
	2 Jumlah PKK yang dibina			Posyandu	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 4
	3 Jumlah LPM yang dibina			LPM	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 4
	4 Jumlah Pelaksanaan Posyandu yang dibina		Posyandu	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 2	

	<p>5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina</p>	<p>orang</p>	<p>TW 1 : 75 TW 2 : 75 TW 3 : 0 TW 4 : 0</p>
	<p>6 Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang dibina</p>	<p>MHA</p>	<p>TW 1 : 0 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 3</p>



1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 14.866.705.000 (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 17.068.705.000,- (Tujuh belas milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.018.705.000,- (Delapan milyar delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.050.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 16.069.978.333,- (enam belas milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 94.15% dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.331.634.553,- (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 91.43%, dan belanja langsung sebesar Rp. 8.738.343.780,- (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 96.56%.

2. Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.018.705.000,-	7.331.634.553,-	91.43
2	Belanja Langsung	9.050.000.000,-	8.738.343.780,-	96.56
	Jumlah	17.068.705.000,-	16.069.978.333,-	94.15



3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	9.050.000.000,-	53.02 %	



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi system AKIP Tahun Sebelumnya.

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21.51	22.73
2	Pengukuran Kinerja	25 %	15.31	15.94
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10.43	10.42
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6.35	6.35
5	Capaian Kinerja	20 %	11.34	11.38
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	65.00	67.82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 65 dengan predikat penilaian "B".

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1.	Agar memperhatikan keselarasan kinerja mulai RPJMD, PK hingga individu	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memperhatikan keselarasan kinerja mulai RPJMD, PK hingga individu	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019
2.	Meningkatkan kualitas hasil	Koordinasi, Konsolidasi dan	- Membuat Instrumen Monitoring dan



	monev dilingkungan DPMPD dalam rangka pencapaian target menengah sampai tahun berjalan dan mereviu secara berkala atas dokumen Renstra	Monitoring Rutin Kepala Dinas untuk Evaluasi Hasil Monev di Lingkungan DPMPD dalam rangka pencapaian target target menengah sampai tahun berjalan dan mereviu secara berkala atas dokumen Renstra	Evaluasi - Rapat Evaluasi secara berkala Intern di Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur - Laporan tertulis/lisan Pejabat yang membidangi
3.	Memperhatikan keselarasan kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memperhatikan kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019
4.	Memanfaatkan PK untuk mengukur keberhasilan sehingga dapat digunakan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Pengukuran Hasil Kinerja Organisasi, pengarahan dan pengambilan kebijakan di tahun tahun berikutnya/dimasa mendatang didasarkan dan memanfaatkan PK	Kewajiban membuat Laporan Kinerja dengan memanfaatkan PK untuk mengukur keberhasilan
5.	Perjanjian Kinerja agar sepenuhnya dimanfaatkan kinerjanya sampai kepada tingkat Eselon III	Kepala Dinas secara berjenjang memberikan Perintah Perjanjian Kinerja agar sepenuhnya dimanfaatkan	Nota Dinas dari Kepala Dinas kepada Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian Perihal Pemanfaatan Perjanjian Kinerja agar



	dan IV	kinerjanya sampai kepada tingkat Eselon III dan IV	sepenuhnya dimanfaatkan kinerjanya
6.	Indikator Kinerja Eselon IV dan III memperhatikan keterukunan, relevan (smart) dan keselarasan dengan indikator kinerja atasannya	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama Indikator Kinerja Eselon IV dan III akan memperhatikan keterukunan, relevan (smart) dan keselarasan dengan indikator kinerja secara berjenjang di atasnya	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019
7.	Dokumen Indikator Kinerja Utama agar dilakukan reviu secara berkala dan dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran serta hasil mengukur kinerja dari eselon IV keatas dikaitkan dengan reward dan punishment	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas/Eselon II beserta Eselon III dan IV secara berkala melakukan reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama- Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di dasarkan Prioritas Program dan Pengukuran Kinerja	Laporan Hasil Kinerja dibuat oleh masing masing Eselon III dan Eselon IV sebagai Dasar Kepala Dinas/Eselon II memberikan reward dan punishment
8.	Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi	Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) supaya	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019



	Pemerintah (LKjIP) supaya mengungkapkan berkinerja dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja	mengungkapkan berkinerja dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja	
9.	Meningkatkan kualitas evaluasi atas pemantauan Rencana Aksi dalam rangka memberikan alternative perbaikan	Untuk meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan dilakukan peningkatan kualitas evaluasi atas pemantauan Rencana Aksi dalam rangka memberikan alternative perbaikan.	Implementasi dan Perbaikan Rencana Aksi dan pemantauan pelaksanaannya secara berkala pada tahun 2019
10.	Hasil evaluasi atas program yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan rekomendasi-	Komitmen secara berjenjang dari Pejabat Eselon II, III dan IV bahwa Hasil evaluasi atas program yang telah dilaksanakan agar	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019



	rekomendasi perbaikan maupun peningkatan kinerja. Selanjutnya hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan maupun peningkatan kinerja. Selanjutnya hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan pengambilan kebijakan selanjutnya.	
11.	Supaya lebih meningkat Capaian Kinerja baik output maupun outcome sesuai target yang telah ditetapkan dengan dukungan informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama Target Kinerja output dan outcome akan memperhatikan target yang telah ditetapkan dengan dukungan informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan.	Implementasi dan Perbaikan SAKIP pada tahun 2019 sebagai penerapan manajemen kinerja Kepala Dinas serta seluruh Jajaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRI WULANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	15	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100
		Jumlah Bumdes yang aktif	Bumdes	2,9	Triwulan I	4		
					Triwulan II	6		
					Triwulan III	4		
					Triwulan IV	1	1	100
		Jumlah Desa Dengan Status Berkembang	Persen	2,9	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100



		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan	Persen	2,9	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100
		Presentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Aktif	Persen	2,9	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100
		Presentase Desa Yang Menjadii Kampung Iklim	Persen	2,9	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100



C. Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	15	14	93.33
2.	Presentase Bumdesa Aktif	%	2,9	2,9	100
3.	Presentase Desa Dengan Status Berkembang	%	2,9	2,9	100
4.	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan	%	2,9	2,9	100
5.	Presentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Aktif	%	2,9	2,9	100
6.	Presentase Desa Yang Menjadi Kampung Iklim	%	2,9	2,9	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2019
			Baseline Data (2017)	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	518	518	504	93.33
2.	Presentase Bumdesa Aktif	%	302	302	317	+ 100 %
3.	Presentase Desa Dengan Status Berkembang	%	289	289	303	93.33



4.	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan	%	323	323	338	+ 100 %
5.	Presentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Aktif	%	289	289	2,9	100
6.	Presentase Desa Yang Menjadi Kampung Iklim	%	0	0	15	100

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:

- Dari hasil realisasi capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**" dapat dikatakan berhasil Hal ini dapat dilihat dari capaian yang berhasil dengan Penjelasan sebagai berikut:

Untuk Indikator "**Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal** ", yang merupakan IKU Eselon II dan di ungit oleh seluruh Program dan Kegiatan yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Dari Target 15 Desa, di Tahun 2019 terealisasi sebanyak 14 Desa. Rincian sebagai berikut :

Tahun	Kabupaten							Total
	PASER	KUKAR	KUTIM	KUBAR	PPU	BERAU	MAHULU	
2019	Desa Kerta Bumi, Kec. Kuaro	Desa Kedang Ipil, Kec. Kota Bangun	Desa Rantau Makmur, Kec. Rantau Pulung	Desa Lambing, Kec. Muara Lawa	Desa Bukit Subur, Kec. Penajam	Desa Dumaring, Kec. Talisayan	Desa Long Gelawang, Kec. Laham	15 desa
	Desa Tabru Paser Damai, Kec. Batu Engau	Desa Kedang Murung, Kec. Kota Bangun	Desa Long Segar, Kec. Telen	Desa Ombau Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Karang Jinawi, Kec. Sepaku	Desa Pulau Derawan, Kec. Pulau Derawan	Desa Batu Majang, Kec. Long Bagun	



		Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun				
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: KPW Prov. Kaltim

Dari Tabel diatas, Kotak berwarna biru berarti Desa tersebut naik statusnya dari desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang, data diatas merupakan Updating Data dari IDM (Indeks Desa Membangun) yang diolah oleh KPW (Koordinator Pendamping Wilayah) Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk Indikator "**Presentase Bumdesa Aktif**", yang juga menyasar 15 Desa sasaran RPJMD DPMPD Prov. Kaltim di Tahun 2019. Di Tahun anggaran 2019 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami deficit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing masing organisasi perangkat daerah. Berada dalam situasi seperti ini maka butuh strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal. Peningkatan koordinasi dengan jajaran bidang ekonomi masyarakat pada dinas PMD Kabupaten, serta dengan mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping desa dan pendamping local desa merupakan strategi yang ditempuh untuk melakukan pembinaan BUMDesa. Secara rinci hasil pembinaan BUMDesa di Tahun 2019 sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kampung	Nama BUMDesa
Berau	Talisayan	Dumaring	Amparan Tikar
	P. Derawan	P. Derawan	Bakkupulan
Kutai Barat	Muara Lawa	Lambing	Lamping Prima
	Barong Tongkok	Ombau Asa	Menarung Sejahtera
PPU	Penajam	Bukit Subur	Subur Lestari
	Sepaku	Karang Jinawi	Harapan Bersama
Kutim	Rantau Pulung	Rantau Makmur	Rama Mandiri
	Teluk Pandan	Martadinata	Martajaya
Kukar	Kota Bangun	Kedang Ipil	Jogowono Diwongso
		Kedang Murung	Karya Usaha Mandiri
		Kota Bangun Ilir	Kota Bangun Ilir
Paser	Kuaro Batu Engau	Kerta Bumi	Usaha Jaya Makmur



		Tabru Paser Damai	Sumber Rejeki
Mahulu	Long Bagun	Long Bagun Ilir	Family Jaya
		Batu Majang	Karya Agung

Untuk Indikator "**Presentase Bumdesa Aktif**", yang bertanggung jawab adalah Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna. Bidang ini bertanggung jawab atas Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang merupakan Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Ada 1 Program yang juga diberikan untuk untuk membantu dan menjadi pengungkit untuk Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yaitu Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, dengan 2 kegiatan yaitu Pemasarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat. Untuk Kegiatan Pemasarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan target jumlah posyantek yang aktif, rincian sebagai berikut :

Data Posyantek Aktif
Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Nama Posyantek
1	Samarinda	Sungai Pinang	Sungai Pinang
2	Balikpapan	Balikpapan Selatan	Pinandita
3	Berau	Sambaliung	Sambaliung
4	Berau	Gunung Tabur	Gunung Tabur
5	Berau	Teluk Bayur	Teluk Bayur
6	Kutai Timur	Bengalon	Odah Etam Berkarya
7	Kutai Kartegara	Sanga Sanaga	99 Sanga Sanga
8	Kutai Kartanegara	Muara Jawa	Tugul
9	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Sri Bangun
10	Paser	Long Kali	Bente Tualan
11	Paser	Long Ikis	Tajur
12	Paser	Muara Komam	Karya Mandiri
13	Paser	Batu Sopang	Songka
14	Paser	Paser Belengkong	Kresik Bura



15	Paser	Batu Engau	Lamu
16	Paser	Batu Engau	Tampaka
17	Paser	Batu Engau	Tebru Paser Damai
18	Paser	Batu Engau	Luraq Dayo

Data tersebut diatas menggambarkan target kinerja yang dicapai, dari target 18 posyantek dan realisasinya 18 posyantek (100%). Peningkatan koordinasi dengan jajaran bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna pada dinas DPMPD/K Kabupaten, serta dengan mengoptimalkan pembinaan posyantek secara teknis.

Untuk Indikator "**Presentase Desa dengan Status Berkembang**", yang juga menyasar 15 Desa sasaran RPJMD DPMPD Prov. Kaltim di Tahun 2019. Dari perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, yang berhasil ditingkatkan statusnya dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang tercapai sebanyak 14 desa (93,33%).

Tahun	Kabupaten							Total
	PASER	KUKAR	KUTIM	KUBAR	PPU	BERAU	MAHULU	
2019	Desa Kerta Bumi, Kec. Kuaro	Desa Kedang Ipil, Kec. Kota Bangun	Desa Rantau Makmur, Kec. Rantau Pulung	Desa Lambing, Kec. Muara Lawa	Desa Bukit Subur, Kec. Penajam	Desa Dumaring, Kec. Talisayan	Desa Long Gelawang, Kec. Laham	15 desa
	Desa Tabru Paser Damai, Kec. Batu Engau	Desa Kedang Murung, Kec. Kota Bangun	Desa Long Segar, Kec. Telen	Desa Ombau Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Karang Jinawi, Kec. Sepaku	Desa Pulau Derawan, Kec. Pulau Derawan	Desa Batu Majang, Kec. Long Bagun	
		Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun						

Sumber : KPW Kaltim

Untuk indikator "**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan**" yang berada di Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan, dengan 3 Kegiatan. Dari 3 Kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :



Terkait Data aparatur desa/ Kelurahan dan Badan permusyawaratan desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas, dengan satuan 10 Kab/Kota, telah terealisasi sebanyak 100 %.

Terkait Data Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan Pengelolaan Keuangan Desa, data sebagai berikut :

Tabel Penyaluran Dana Desa Tahap I (RKUD ke RKD)

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	TOTAL PAGU DANA DESA 2019 BERDASARKAN PERBUP	PAGU DANA DESA TAHAP I (20%) DARI RKUN KE RKUD	JUMLAH TRANSFER DARI RKUD KE RKD TAHAP I (20%)	JUMLAH DESA CAIR TAHAP I	
1	PASER	10	139	122.624.619.000	24.524.923.800	24.524.923.800	20%	139
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	37.072.354.800	37.067.352.639	20%	193
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	21.980.283.400	21.804.031.400	20%	99
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	34.619.566.800	34.619.566.800	20%	190
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	34.375.520.400	33.938.438.984	20%	137
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	6.954.971.400	6.954.971.400	20%	30
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	14.496.295.800	14.496.298.800	20%	50
TOTAL		81	841	870.119.582.000	174.023.916.400	173.405.583.823	20%	838

Tabel Penyaluran Dana Desa Tahap II (RKUD ke RKD)

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	TOTAL PAGU DANA DESA 2019 BERDASARKAN PERBUP	PAGU DANA DESA TAHAP II (40%) DARI RKUN KE RKUD	JUMLAH TRANSFER DARI RKUD KE RKD TAHAP II (40%)	JUMLAH DESA CAIR TAHAP II	
1	PASER	10	139	122.624.619.000	47.500.297.200	49.049.837.600	40%	139
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	70.701.263.400	73.339.565.092	40%	192
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	42.889.920.800	43.371.992.170	39%	99
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	69.239.133.600	69.239.133.840	40%	190
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	66.134.840.736	67.899.675.329	40%	137
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	13.909.942.800	13.909.942.800	40%	30
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	28.992.591.600	28.992.591.600	40%	50
TOTAL		81	841	870.119.582.000	339.367.990.136	345.802.738.431	40%	837



Tabel Penyaluran Dana Desa Tahap III (RKUD ke RKD)

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	TOTAL PAGU DANA DESA 2019 BERDASARKAN PERBUP	PAGU DANA DESA TAHAP III (40%) DARI RKUN KE RKUD	JUMLAH TRANSFER DARI RKUD KE RKD TAHAP III (40%)		JUMLAH DESA CAIR TAHAP III
1	PASER	10	139	122.624.619.000	49.049.847.600	47.500.972.800	39%	138
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	74.144.709.255	73.339.208.334	40%	192
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	43.960.566.800	43.861.589.430	40%	99
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	69.239.133.600	69.239.133.840	40%	190
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	68.751.040.800	65.501.560.964	38%	132
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	13.909.942.800	13.909.942.800	40%	30
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	28.992.591.600	27.863.173.200	38%	48
TOTAL		81	841	870.119.582.000	348.047.832.455	341.215.581.368	39%	829

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan progres pencairan dana desa tahap I, II dan III Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes) adalah sebesar 98,88% atau sebesar Rp. 860.423.903.622,- dari keseluruhan dana sebesar Rp. 861.439.738.991,- yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Terkait Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/ Kampung dan Kelurahan di Tingkat Provinsi Tahun 2019, dari Target 10, Tercapai 7, dengan rincian sebagai berikut :

▪ Juara Perlombaan Desa/Kampung

NO.	JUARA	DESA/KAMPUNG	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	I	BATU PUTIH	BATU PUTIH	BERAU
2.	II	TELEMOW	SEPAKU	PENAJAM PASER UTARA
3.	III	PENAWAI	BONGAN	KUTAI BARAT



▪ Juara Perlombaan Kelurahan

NO	JUARA	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	I	TERITIP	BALIKPAPAN TIMUR	BALIKPAPAN
2.	II	BEREBAS TENGAH	BONTANG SELATAN	BONTANG
3.	III	MUGIREJO	SUNGAI PINANG	SAMARINDA

Untuk indikator "**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan aktif dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan**", ada 6 kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target, dan telah teralisasi 100 %.

Kegiatan pertama yaitu Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) tingkat provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan pemenang sebagai berikut :

No.	Uraian	Desa/Kec	Kab/kota
	Juara 1 Kampung Sumber Sari	Barong Tongkok	Kutai Barat
	Juara 1 Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Balikpapan

- Untuk pembinaan posyandu, telah dilakukan koordinasi melalui pokjanal provinsi dan kabupaten/kota pembinaan Posyandu tercapai dengan hasil sebagai berikut:
 - Untuk Kategori Juara I Kategori Kota adalah Posyandu Anyelir Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda
 - Juara II Kategori kota II Posyandu Ria Kencana 14 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan.



- Juara III Kategori Kota III adalah Posyandu Cenderawasih, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang.
 - Untuk Kategori Kabupaten Juara I Posyandu Delima Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser.
 - Juara II Posyandu Medang Jaya, Kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau
 - Juara III Posyandu Cenderawasih, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
- Data TP.PKK Hasil Koordinasi Pembinaan Tahun 2018 sbb:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kampung
Kutai Kartanegara	Sebulu	Sebulu ilir
	Muara Wis	Lebak Cilong
	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir
	Samboja	Karya Jaya
	Marang Kayu	Sebuntal
Kutai Barat	Tering	Tering Lama
	Melak	Empas
	Sekolaq Darat	Sri Mulyo
	Linggang Bigung	Tutung
	Muara Lawa	Lambing
	Muara Pahu	Mendung
	Penyinggahan	Loa Deras
	Bongan	Lemper
	Barong Tongkok	Mencimai Asa
Mahulu	Long Hubung	Mamahak teboq
		Lutan
		Long Hubung
	Laham	Danung Paroy
	Long Bagun	Long Bagun ulu
		Batoq Kelo
		Rukun Damai
		Mamahak Besar
		Ujoh Bilang
		Long Bagun

Untuk indikator "**Presentase Desa Yang Menjadi Desa Kampung Iklim**" Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama



dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagai salah satu lokasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang berfokus kepada memberikan sosialisasi kepada Kabupaten yang telah di tunjuk oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI). Pemilihan daerah daerah yang menjadi sasaran Program Kampung iklim didasari oleh tutupan hutan. Daftar nama daerah yang menjadi target adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Desa/ Kampung	Tutupan Hutan (%)
BERAU	Kampung Long Ayan	50.54
	Kampung Punan Malinau	42.65
	Kampung Long Laáy	41.59
KUTAI BARAT	Desa Kendisiq	20.61
	Intu Lingau	22.25
PPU	Riko	14.82
	Pemaluan	4.10
	Mentawir	-
KUTIM	Sangatta Selatan	39.54
	Tepian Langsung	28.93
	Miau Baru	39.56
KUKAR	Menamang Kanan	28.64
	Jonggon Desa	6.76
KUBAR	Swan Slutung	48.27
	Kepala Telake	26.48
	Muara Lambakan	48.94
MAHAKAM ULU	Mamahak Ulu	252.89
	Long Keriog	167.48
	Long Apari	132.78

Kriteria utama Pemilihan Kampung Iklim didasari oleh Tutupan Hutan, dengan kriteria skoring terbagi menjadi 5 yaitu stock karbon, ancaman, keberadaan KAT, inisiatif dan Purposive. Dari 841 Desa yang ada di Kalimantan Timur, tersaring 300 Desa Remaining Forest (data dari DDPI Kaltim). Dari 300 yang tersaring, kriteria utama pemilihan adalah aksesibilitas, teknis administrative, inisiatif yang sudah ada, gambut dan purposive lainnya.



- b. Penurunan Kinerja
- Kegiatan Lomba Desa (dari 10 Kab.kota yang ditargetkan yang berpartisipasi pada llomdeskel tingkat Provinsi tahun 2019 hanya 4 Kab(kab. Berau, PPU, Kubar, Kutim) dan 3 Kota(samarinda, bpp, bontang) yang ikuti berpartisipasi mengirimkan perwakilan desa dan kelurahan terbaiknya untuk mengikuti lomba desa dan kab tingkat provinsi). 3 Kab yang tidak mengirimkan wakilnya adalah Kab. Paser, Kukar, dan Mahakam Ulu dengan alasan sebagai berikut :
 - keterbatasan anggaran APBD Kab. Sehingga tidakmenggambarkan biaya untuk kegiatan lomdeskel
 - terkendala Penjadwalan lomba di tingkat kecamatan/Kab sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti penjadwalan lomdeskel di tingkat provinsi.
- c. Alternatif/ Solusi
- agar target yg sudah ditetapkan di renstra bisa terelasaki dalam rencana kerja tahun berjalan maka menjadi perhatian untuk pengalokasian anggaran prog/keg yang sesuai dengan target yang ditelah ditetapkan pada renstra perangkat daerah.
 - melakukan sosialisasi pelaksanaan lomdeskel tingka prov. Di awal tahun anggaran berjalan agar terjadi sinkronisasi dan penyelarasan pelaksanaan prog/ kegiatan baik ditingkat kab kota dengan pelaksanaan prog/ kegiatan prov. Sehingga target seluruh kab/kota berpartisipasi mengikuti lomdeskel tingkat prov. Yang nantinya akan di menjadi wakil prov. Untuk ikut lomdeskel di tingkat nasional.
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Dari hasil capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan" adalah 93,33 % atau dapat dikatakan berhasil.
 - Tahun anggaran 2019 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit dan untuk sasaran dan indikator kinerja ini mendapatkan alokasi anggaran. Kalau



hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai. Berada dalam kondisi seperti ini maka bidang melakukan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga capaian kinerja dapat dikatakan berhasil. Dengan 841 Desa yang ada di Kalimantan Timur dan masing masing desa memiliki karakteristik yang berbeda, menjadi tantangan terbesar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Sasaran.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100	94,15	0.3

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di desa sangat tertinggal dan sangat tertinggal	Jumlah BUMDesa yang aktif	15 Bumdes	15 Bumdesa	100	15 Bumdes	15 Bumdesa	100
		Jumlah Desa berkembang	2,9	2,9	100	2,9	2,9	100
		Presentase penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang	2,9	2,9	100	2,9	2,9	100



		memperoleh pembinaan						
		Presentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	2,9	2,9	100	2,9	2,9	100
		Presentase desa yang menjadi kampung iklim	2,9	2,9	100	2,9	2,9	100



2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	APBD	APBD-P	REALISASI	persen (%)	REALISASI	persen (%)
1	2	3	4	7	8	9	10
2.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.816.705.000,00	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	687.070.447,00	8,57
2.07.01.01.00	Non Program	7.816.705.000,00	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	687.070.447,00	8,57
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.026.728.000,00	3.026.728.000,00	2.683.456.500,00	88,66	343.271.500,00	11,34
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	249.215.000,00	249.215.000,00	234.759.196,00	94,20	14.455.804,00	5,80
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	249.215.000,00	249.215.000,00	247.100.000,00	99,15	2.115.000,00	0,85
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	84.737.000,00	84.737.000,00	69.970.000,00	82,57	14.767.000,00	17,43
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.767.000,00	152.767.000,00	116.813.460,00	76,47	35.953.540,00	23,53
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	47.918.000,00	47.918.000,00	16.251.176,00	33,91	31.666.824,00	66,09
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	47.000,00	47.000,00	40.294,00	85,73	6.706,00	14,27
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	92.879.000,00	92.879.000,00	85.304.689,00	91,84	7.574.311,00	8,16
5.1.1.01.21	BPJS Ketenagakerjaan	22.854.000,00	22.854.000,00	11.215.738,00	49,08	11.638.262,00	50,92
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.420.500.000,00	3.622.500.000,00	3.551.440.000,00	98,04	71.060.000,00	1,96
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya	469.845.000,00	469.845.000,00	315.283.500,00	67,10	154.561.500,00	32,90
2.07.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.866.120.000,00	1.879.120.000,00	1.796.312.621,00	95,59	82.807.379,00	4,41
2.07.01.01.07.01	Pelaksana Adminstrasi Perkantoran	1.866.120.000,00	1.879.120.000,00	1.796.312.621,00	95,59	82.807.379,00	4,41



5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan	463.200.000,00	463.200.000,00	463.200.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	32.286.250,00	99,65	113.750,00	0,35
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	10.000.000,00	9.999.000,00	99,99	1.000,00	0,01
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.12	Belanja Peralatan dan Kelengkapan Kesehatan	-	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	7.055.148,00	97,99	144.852,00	2,01
5.2.2.03.02	Belanja Air	66.000.000,00	66.000.000,00	33.261.611,00	50,40	32.738.389,00	49,60
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	200.400.000,00	200.400.000,00	192.474.225,00	96,05	7.925.775,00	3,95
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.000,00	99,97	2.000,00	0,03
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Internet/ TV Kabel/ TV Satelit	96.600.000,00	96.600.000,00	58.554.937,00	60,62	38.045.063,00	39,38
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Teknis/ Non Teknis	911.950.000,00	911.950.000,00	911.950.000,00	100,00	-	-
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	9.983.400,00	83,20	2.016.600,00	16,81
5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan/ Fotocopy/ Penjilidan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.487.250,00	99,83	12.750,00	0,17
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.200.000,00	34.200.000,00	32.392.800,00	94,72	1.807.200,00	5,28



5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Seragam Lengkap Satpam	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	-	-
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.900.000,00	644.900.000,00	614.033.843,00	95,21	30.866.157,00	4,79
2.07.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	525.900.000,00	644.900.000,00	614.033.843,00	95,21	30.866.157,00	4,79
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.100.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	-	-
5.2.1.01.03	Honorarium Bulanan	22.800.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	10.375.000,00	10.317.500,00	99,45	57.500,00	0,55
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	39.500.000,00	61.825.000,00	60.329.000,00	97,58	1.496.000,00	2,42
5.2.2.03.16	Belanja Pemeliharaan Kantor dan Taman	223.000.000,00	253.100.000,00	252.849.336,00	99,90	250.664,00	0,10
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	100,00	-	-
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	56.000.000,00	56.000.000,00	55.966.407,00	99,94	33.593,00	0,06
5.2.2.10.12	Belanja sewa peralatan dan kelengkapan pameran/pagelaran/lomba lomba	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	50,00	15.000.000,00	50,00



5.2.2.32.18	Belanja Pengadaan Lemari	5.000.000,00	-	-	-	-	-
5.2.2.34.04	Belanja Pengadaan mesin fotocopy	15.000.000,00	-	-	-	-	-
5.2.2.36.01	Belanja Pengadaan Printer	6.000.000,00	-	-	-	-	-
5.2.2.36.08	Belanja Pengadaan komputer note book	25.000.000,00	-	-	-	-	-
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	-	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	-
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00	8,33
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00	200.000,00	4,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	106.000.000,00	95.030.800,00	89,65	10.969.200,00	10,35
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	12.000.000,00	11.190.800,00	93,26	809.200,00	6,74
5.2.3.36.61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Laboratorium Kearsipan	7.500.000,00	7.500.000,00	6.700.000,00	89,33	800.000,00	10,67
2.07.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	993.250.000,00	1.368.250.000,00	1.332.948.502,00	97,42	35.301.498,00	2,58



2.07.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	993.250.000,00	1.368.250.000,00	1.332.948.502,00	97,42	35.301.498,00	2,58
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	35.000.000,00	33.325.000,00	95,21	1.675.000,00	4,79
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minum Rapat	56.000.000,00	73.500.000,00	60.737.500,00	82,64	12.762.500,00	17,36
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	17.500.000,00	17.426.600,00	99,58	73.400,00	0,42
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/pelatihan	52.250.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	495.000.000,00	590.000.000,00	588.913.264,00	99,82	1.086.736,00	0,18
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.000.000,00	600.000.000,00	580.296.138,00	96,72	19.703.862,00	3,28
2.07.01.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	233.964.000,00	233.964.000,00	209.091.289,00	89,37	24.872.711,00	10,63
2.07.01.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	193.964.000,00	193.964.000,00	172.990.519,00	89,19	20.973.481,00	10,81
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	18.339.950,00	91,24	1.760.050,00	8,76
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	12.364.000,00	12.364.000,00	12.164.400,00	98,39	199.600,00	1,61



5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	29.920.000,00	99,73	80.000,00	0,27
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	11.386.480,00	75,91	3.613.520,00	24,09
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	49.179.689,00	93,68	3.320.311,00	6,32
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	28.000.000,00	16.000.000,00	57,14	12.000.000,00	42,86
2.07.01.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	36.100.770,00	90,25	3.899.230,00	9,75
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	7.466.800,00	93,34	533.200,00	6,67
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.849.300,00	96,99	150.700,00	3,01
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	9.718.150,00	80,98	2.281.850,00	19,02
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	14.066.520,00	93,78	933.480,00	6,22
2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	390.000.000,00	465.000.000,00	456.201.035,00	98,11	8.798.965,00	1,89
2.07.01.01.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	153.500.000,00	213.500.000,00	212.084.746,00	99,34	1.415.254,00	0,66
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-	-



5.2.2.01.11	Belanja Plakat/ Cindera Mata/ Piagam	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggadaan/ Fotocopy/ Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.750,00	99,99	250,00	0,01
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	100.000.000,00	99.820.100,00	99,82	179.900,00	0,18
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	69.764.896,00	99,66	235.104,00	0,34
5.2.2.57.01	Uang untuk di berikan kepada pihak ke tiga	27.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	96,30	1.000.000,00	3,70
2.07.01.01.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	43.586.000,00	87,17	6.414.000,00	12,83
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	3.586.000,00	35,86	6.414.000,00	64,14
2.07.01.01.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	76.000.000,00	91.000.000,00	90.968.459,00	99,97	31.541,00	0,03
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-



5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.250.000,00	64.250.000,00	64.224.859,00	99,96	25.141,00	0,04
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	14.993.600,00	99,96	6.400,00	0,04
2.07.01.01.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	110.500.000,00	110.500.000,00	109.561.830,00	99,15	938.170,00	0,85
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.11	Belanja Plakat/ Cendera Mata/ Piagam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	64.000.000,00	63.999.000,00	100,00	1.000,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	34.062.830,00	97,32	937.170,00	2,68
2.07.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	148.045.000,00	203.045.000,00	202.558.900,00	99,76	486.100,00	0,24
2.07.01.01.16.1	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	148.045.000,00	203.045.000,00	202.558.900,00	99,76	486.100,00	0,24



5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	4.012.500,00	99,07	37.500,00	0,93
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan Dan Minuman Rapat	4.095.000,00	9.095.000,00	9.000.000,00	98,96	95.000,00	1,04
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	90.000.000,00	89.795.000,00	99,77	205.000,00	0,23
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	60.000.000,00	59.851.400,00	99,75	148.600,00	0,25
5.2.2.57.02	Uang untuk di Berikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000,00	80.000.000,00	78.870.700,00	98,59	1.129.300,00	1,41
2.07.01.01.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000,00	80.000.000,00	78.870.700,00	98,59	1.129.300,00	1,41
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	78.870.700,00	98,59	1.129.300,00	1,41
2.07.01.01.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	260.350.000,00	318.350.000,00	310.824.346,00	97,64	7.525.654,00	2,36



2.07.01.01.21.01	Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	260.350.000,00	318.350.000,00	310.824.346,00	97,64	7.525.654,00	2,36
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.000.000,00	68.000.000,00	65.250.000,00	95,96	2.750.000,00	4,04
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	6.000.000,00	5.878.550,00	97,98	121.450,00	2,02
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.684.750,00	89,49	315.250,00	10,51
5.2.2.11.02	Belanja Makan Dan Minuman Rapat	30.350.000,00	30.350.000,00	30.000.000,00	98,85	350.000,00	1,15
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	125.000.000,00	122.480.979,00	97,98	2.519.021,00	2,02
5.2.2.15.02	Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	77.000.000,00	75.530.067,00	98,09	1.469.933,00	1,91
2.07.01.01.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	252.811.000,00	347.811.000,00	342.995.690,00	98,62	4.815.310,00	1,38
2.07.01.01.22.01	Pemasyarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	197.011.000,00	262.011.000,00	258.240.790,00	98,56	3.770.210,00	1,44
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00	-	-
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-	-



5.2.2.01.11	Belanja Plakat/ Cinderamata/ Piagam	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	3.356.000,00	3.356.000,00	3.350.000,00	99,82	6.000,00	0,18
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	28.000.000,00	28.000.000,00	25.750.000,00	91,96	2.250.000,00	8,04
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.005.000,00	4.005.000,00	4.000.000,00	99,88	5.000,00	0,12
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	92.000.000,00	91.888.400,00	99,88	111.600,00	0,12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	80.000.000,00	78.602.390,00	98,25	1.397.610,00	1,75
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	55.800.000,00	85.800.000,00	84.754.900,00	98,78	1.045.100,00	1,22
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	-	-



5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.350.000,00	48.350.000,00	48.079.100,00	99,44	270.900,00	0,56
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	23.000.000,00	22.225.800,00	96,63	774.200,00	3,37
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.500.000.000,00	1.735.000.000,00	1.693.472.347,00	97,61	41.527.653,00	2,39
2.07.01.01.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan	1.180.000.000,00	1.415.000.000,00	1.388.701.640,00	98,14	26.298.360,00	1,86
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	3.800.000,00	11.300.000,00	11.250.000,00	99,56	50.000,00	0,44
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-



5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	344.400.000,00	344.400.000,00	319.200.000,00	92,68	25.200.000,00	7,32
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan	16.900.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Biaya dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	50.000,00	2,50
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	600.000,00	1,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	30.000.000,00	29.980.000,00	99,93	20.000,00	0,07
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	60.000,00	0,40
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.14.05	Belanja pakaian seragam tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	470.000.000,00	469.720.100,00	99,94	279.900,00	0,06
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	270.000.000,00	269.961.540,00	99,99	38.460,00	0,01
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.57.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	-	-



2.07.01.01.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	99.955.100,00	99,96	44.900,00	0,04
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00	98,00	20.000,00	2,00
5.2.2.03.13	Biaya Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	34.985.200,00	99,96	14.800,00	0,04
5.2.2.15.02	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	19.989.900,00	99,95	10.100,00	0,05
5.2.2.23.02	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.57.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.26.03	Peningkatan Usaha Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000,00	99.889.600,00	99,89	110.400,00	0,11
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-



5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	24.906.600,00	99,63	93.400,00	0,37
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	29.983.000,00	99,94	17.000,00	0,06
5.2.2.43.06	Belanja Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	-	-
5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.57.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	-	-

2.07.01.01.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	120.000.000,00	120.000.000,00	104.926.007,00	87,44	15.073.993,00	12,56
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.11	Belanja Plakat/ Cinderamata/ Piagam	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	54.929.800,00	99,87	70.200,00	0,13



5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	39.996.207,00	99,99	3.793,00	0,01
5.2.2.57.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00		-	15.000.000,00	100,00
2.07.01.01.27	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.560.000,00	24.560.000,00	24.280.000,00	98,86	280.000,00	1,14
2.07.01.01.27.01	Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	24.560.000,00	24.560.000,00	24.280.000,00	98,86	280.000,00	1,14
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	2.060.000,00	2.030.000,00	98,54	30.000,00	1,46
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Biaya Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	472.000.000,00	1.200.000.000,00	1.130.920.843,00	94,24	69.079.157,00	5,76



2.07.01.01.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	38.800.000,00	569.300.000,00	511.224.190,00	89,80	58.075.810,00	10,20
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	-
5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	-	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	51.950.000,00	39.320.000,00	75,69	12.630.000,00	24,31
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	-	3.600.000,00	2.400.000,00	66,67	1.200.000,00	33,33
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	-	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	-	4.500.000,00	3.225.000,00	71,67	1.275.000,00	28,33
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	-	25.200.000,00	25.196.000,00	99,98	4.000,00	0,02
5.2.2.06.03	Biaya dokumentasi	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	7.000.000,00	6.995.000,00	99,93	5.000,00	0,07
5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Rapat	-	186.000.000,00	181.600.000,00	97,63	4.400.000,00	2,37
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	100.200.000,00	99.922.100,00	99,72	277.900,00	0,28
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	56.600.000,00	56.316.090,00	99,50	283.910,00	0,50



5.2.2.56.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	41.000.000,00	35.000.000,00	85,37	6.000.000,00	14,63
-------------	---	---	---------------	---------------	-------	--------------	-------

2.07.01.01.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	41.800.000,00	138.800.000,00	136.491.655,00	98,34	2.308.345,00	1,66
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	9.800.000,00	8.490.400,00	86,64	1.309.600,00	13,36
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	65.200.000,00	64.982.305,00	99,67	217.695,00	0,33
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	56.600.000,00	55.818.950,00	98,62	781.050,00	1,38
2.07.01.01.28.03	Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	391.400.000,00	491.900.000,00	483.204.998,00	98,23	8.695.002,00	1,77
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.600.000,00	87.600.000,00	86.500.000,00	98,74	1.100.000,00	1,26
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	75,00	375.000,00	25,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	100,00	-	-



5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	31.000.000,00	88,57	4.000.000,00	11,43
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33	200.000,00	6,67
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.465.000,00	22.465.000,00	22.455.000,00	99,96	10.000,00	0,04
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	100.000.000,00	99.970.800,00	99,97	29.200,00	0,03
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.085.000,00	147.085.000,00	144.104.198,00	97,97	2.980.802,00	2,03
5.2.2.57.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	-	-
2.07.01.01.29	Program Pembangunan Desa Dan Kawasan	300.000.000,00	550.000.000,00	545.833.664,00	99,24	4.166.336,00	0,76
2.07.01.01.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa	100.000.000,00	225.000.000,00	223.551.840,00	99,36	1.448.160,00	0,64
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	-	-
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	-	900.000,00	900.000,00	100,00	-	-
5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Pelatihan	-	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-	-



5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.600.000,00	73.600.000,00	73.279.823,00	99,56	320.177,00	0,44
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.900.000,00	134.900.000,00	133.772.017,00	99,16	1.127.983,00	0,84
2.07.01.01.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Antar Desa	100.000.000,00	175.000.000,00	174.623.125,00	99,78	376.875,00	0,22
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	20.000,00	0,40
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.700.000,00	88.700.000,00	88.696.438,00	100,00	3.562,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	60.000.000,00	59.646.687,00	99,41	353.313,00	0,59

2.07.01.01.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	100.000.000,00	150.000.000,00	147.658.699,00	98,44	2.341.301,00	1,56
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	6.000.000,00	5.988.800,00	99,81	11.200,00	0,19
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	27.850.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00	100,00	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/ Fotocopy/ Penjilidan	2.500.000,00	3.500.000,00	2.820.000,00	80,57	680.000,00	19,43



5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.150.000,00	18.150.000,00	18.075.000,00	99,59	75.000,00	0,41
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	65.500.000,00	65.461.999,00	99,94	38.001,00	0,06
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	19.462.900,00	92,68	1.537.100,00	7,32
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	7.047.000.000,00	9.050.000.000,00	8.738.343.780,00	96,56	311.656.220,00	3,44
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.816.705.000,00	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	687.070.447,00	8,57
	TOTAL A + B	14.863.705.000,00	17.068.705.000,00	16.069.978.333,00	94,15	998.726.667,00	5,85

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mencapai Sasaran Indikator Kinerja Utama dilaksanakan Program/Kegiatan kegiatan utama, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Saran dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 - a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - a. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - b. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat Desa.
 - c. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
 - d. Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat^{98.27}
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
8. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
9. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - a. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna
 10. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.
 - a. Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai nilai kegotong royongan
 - b. Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - c. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat
 - d. Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan.
 11. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
 12. Program Pembinaan penyelenggaraanj Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Monitoring Penyaluran kauangan desa
 - c. Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 13. Program Pembangunan Desa dan Kawasan.
 - a. Pengembangan informasi pembangunan Desa dan Kelurahan.

Dalam Penyelenggaraan Program/Kegiatan Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.

- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dikategorikan sebagai :

- Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :
 1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
 2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
 3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
 4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

- Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
 4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
 5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordinasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri dengan demikian membuka luas program/kegiatan dibawah kontrol dua Kementerian tersebut.

B. Saran

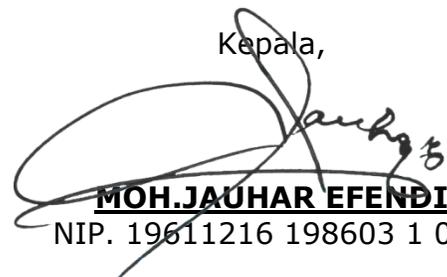
Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka saran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara lain :

- Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.
- Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan

- prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
 - Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala,



MOH. JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penurunan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat Tertinggal	15 desa			
		Persentase Bumdesa Aktif	2.9 %	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
				1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Rp148,045,000.00	
		Persentase Desa dengan Status Berkembang	2.9 %	Program Pembangunan Desa dan Kawasan		
				1 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Rp100,000,000.00	
				2 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Rp100,000,000.00	
				3 Penguatan Informasi Pembangunan	Rp100,000,000.00	
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	2.9 %	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
				1 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp41,800,000.00	
				2 Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Rp41,800,000.00	
				3 Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp391,400,000.00	
		Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	2.9 %	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
				1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Rp292,440,000.00	
		2 Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Rp76,000,000.00			
		3 Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Rp110,500,000.00			

Kepala DPMPD,



Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya

NIP. 40011010-1000000

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi
- 3 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana startegi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 2 Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 3 Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 4 Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 5 Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
 6 Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan tenologi tepat guna;
 7 Penyelenggaraan urusan sekretariat;
 8 Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 9 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Cara Penghitungan dan Penjelasannya	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat Tertinggal	Desa	Menurunkan jumlah status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan meningkatkan Status Desa menjadi Desa Berkembang	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang akan ditingkatkan statusnya menjadi desa berkembang	DPMPD
		Persentase BUMDesa Aktif	%	Mengukur Jumlah BUMDesa terbentuk sesuai UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Bumdesa yang akan diaktifkan pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menjadi sasaran $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Bumdesa aktif pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Bidang UEM, SDA, TTG
		Persentase Desa dengan status berkembang	%	Mewujudkan Desa dengan status desa berkembang	Indeks Desa Membangun (IDM)	Target Jumlah desa berkembang $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Target Jumlah desa berkembang}}$	Bidang Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	%	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa dan Kelurahan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
		Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	%	Meningkatkan peran desa menjadi desa Kampung Iklim	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Bidang UEM, SDA, TTG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Alasan	Sumber Data	Formulasi Cara Penghitungan dan Penjelasan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat Tertinggal	Desa	15	Menurunkan jumlah status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan meningkatkan Status Desa menjadi Desa Berkembang	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang akan ditingkatkan statusnya menjadi desa berkembang	DPMPD
		Persentase BUMDesa Aktif	%	2,9	Mengukur Jumlah BUMDesa terbentuk sesuai UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Bumdesa yang akan diaktifkan pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menjadi sasaran $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Bumdesa aktif pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}}$	Bidang UEM, SDA, TTG
		Persentase Desa dengan status berkembang	%	2,9	Mewujudkan Desa dengan status desa berkembang	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Target Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}} \times 100\%$	Bidang Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan
		Persentase Penyerengaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	%	2,9	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	2,9	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa dan Kelurahan	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
		Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	%	2,9	Meningkatkan peran desa menjadi desa Kampung Iklim	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Jumlah sasaran desa tertinggal dan sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal}} \times 100\%$	Bidang UEM, SDA, TTG

LAPORAN KINERJA PERTRIWULAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
 TRIWULAN KE-4 TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SAMPAI TRIWULAN 4 (Empat)	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Desa	15	0	0	0	15	14	93,33	Target kinerja yang semula di targetkan 15 Desa hanya bisa tercapai di 14 desa dikarenakan susah nya akses ke Desa Long Gelawang Kec.Laham disamping itu juga minimnya anggaran yang harus memaksimalkan target kinerja	Kedepannya harus bisa memaksimalkan Target Kinerja walaupun dengan anggaran yang terbatas
		2 Persentase BUMDesa Aktif 1 Jumlah BUMDesa yang Aktif	Bumdes	15	0	0	0	15	15	100	1) Belum tervalidasinya penambahan BUMDesa sebagaimana data yang disampaikan oleh DPMD/DPMK, mengingat tidak teralokasi anggaran di APBDP untuk melakukan Monitoring BUMDesa 2) Belum terupdate BUMDesa yang aktif, BUMDesa Mandiri maupun BUMDesa yang tidak aktif karena data dari DPMD/DPMK belum bisa dikonfirmasi ke lapangan	Koordinasi dengan DPMD/DPMK untuk dilakukan Monitoring dan Konfirmasi langsung ke masing-masing BUMDesa dan perlu dialokasikan anggaran yang cukup.
		3 Persentase Desa dengan status berkembang 1 Kabupaten yang dibina	Kabupaten	5	0	0	2	3	5	100	Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pemantauan Implementasi Undang-Undang Desa	Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menganggarkan biaya penguatan bagi OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
		2 Pendamping desa yang dibina 3 Tercapainya Penguatan Pengembangan dan Pembangunan antar Desa 4 Tercapainya data dan informasi pembangunan Desa dan antar Desa	Orang Laporan Laporan	50 1 1	0 0 0	0 0 0	50 0 0	0 1 1	50 1 1	100 100 100	Terbatasnya anggaran untuk melakukan monitoring dan pembinaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Belum optimalnya peran Badan Kerjasama Antar Desa (BPKAD) dalam mengawal pembangunan kawasan Perdesaan 1) Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dan penerapan sistem Informasi Desa/Kelurahan 2)Terbatasnya anggaran untuk melakukan pembinaan pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan serta penyebarluasan informasi kepada publik tentang pelaksanaan program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Menyediakan anggaran monitoring dan pembinaan pendamping serta memberikan bantuan operasional khususnya bagi pendamping lokal Desa Memberikan penguatan bagi pelaku Badan Kerjasama Anatar Desa 1) Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Pembinaan kepada Desa dan Kecamatan didalam melakukan proses penyusunan perencanaan di Desa dan Kawasan Perdesaan serta menerapkan Sistem Informasi Desa sebagai bentuk transparansi dan penyebarluasan informasi kepada publik 2) Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan bagi operator Profil Desa/Kelurahan dan memberikan bantuan insentif bagi operator profil Desa dan Kelurahan serta menyediakan dana pembuatan advetorial (publikasi) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

	4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan										
		1 Data aparaturnya Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas	Kab/Kota	10	0	0	0	10	10	100		
		2 Data Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten	7	7	7	7	7	7	100		
		3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi tahun 2019	Kab/Kota	10	0	0	0	0	10	100	1) Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional (regional) yang merupakan agenda tahunan secara nasional. Namun tahun ini tingkat partisipasi Kabupaten/Kota untuk mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi berkurang dikarenakan keterbatasan anggaran masing-masing Kabupaten/Kota untuk mensupport kegiatan dimaksud. Demikian pula di Tingkat Provinsi tahapan penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan secara utuh/menyeluruh (seperti kalifikasi lapangan) 2) Temu Karya Nasional dan PINDesKel adalah agenda tindak lanjut nasional dari hasil Perlombaan Desa dan Kelurahan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mengikuti dan menghadirkan Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi pada event tersebut dan ini membutuhkan penganggaran khusus.	1) Diperlukan Sosialisasi secara masif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan agenda tahunan nasional agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran khusus kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota termasuk up date data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang merupakan tahap awal sebelum penyelenggaraan Lomdeskel. 2) Sangat diharapkan pengalokasian anggaran khusus terkait pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional (regional) serta kegiatan Temu Karya Nasional dan PINDesKel.
	5	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif										
	1 Jumlah pelaksanaan BBGRM	Kab/Kota	10	2	2	2	4	10	100			
	2 Jumlah PKK yang dibina	PKK	10	2	2	2	4	10	100			
	3 Jumlah LPM yang dibina	LPM	10	2	2	2	4	10	100			
	4 Jumlah Posyandu yang dibina	Posyandu	6	1	1	2	2	6	100			
	5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	orang	150	75	75	0	0	150	100	1) KPM di Desa kurang dimanfaatkan pihak Desa. KPM belum di SKkan oleh Kades/Lurah 2) Operasional KPM tidak Jelas 3) Walaupun ada KPM SDMnya masih minim 4) Pihak Kabupaten/Kota belum memahami keberadaan tugas dan Fungsi KPM	1) Keberadaan KPM agar dapat di SK kan 2) Perlu diperhatikan untuk operasional KPM 3) Perlu Sosialisasi keberadaan tugas dan Fungsi KPM	
6 Jumlah MHA yang dibina	MHA	5	0	1	1	3	5	100	1) Keberadaan MHA belum terdata 2) Belum ada Sosialisasi regulasi Perda MHA	1) Perlu Inventarisasi keberadaan MHA 2) Perlu Sosialisasi Regulasi Perda tentang MHA		

**INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
(IKI)**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
2. **TUGAS** : Pengumpulan Data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
3. **Fungsi** :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - b. Penyiapan Bahan Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian, dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - d. Penyiapan Bahan Pembinaan, pengendalian, dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - e. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Masyarakat Desa/Kelurahan, Aparatur Desa/Kelurahan, Kab/Kota	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	Mewujudkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah KPM yang dibina}}{\text{Jumlah KPM se Kaltim}} \times 100\%$	Kabupaten / Kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

Pengelola Data Perencanaan

2. Tugas

Mengelola data dengan cara menyusun, mengorganisir dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar

3. Fungsi

1. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Pengukuran Kinerja 2017
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja 2018, RKT 2018, IKU 2018, Rencana Aksi 2018
5. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi rencana kerja triwulan
6. Mengumpulkan dan mengolah data kinerja triwulan
7. Mengolah data penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
8. Mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Program dan Kegiatan
9. Menyajikan data dan bahan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan

No.	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Atasan	Cara Perhitungan / Penjabaran	Sumber Data	Petanggung Jawab
1.	Penyusunan Perencanaan sesuai dengan Pedoman	1. Data Renja Per Bidang / Bagian	Dokumen	Mengukur Jumlah Data yang menjadi bahan membuat Laporan / Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Renja	- Dokumen Renja - Dokumen RKA - Dokumen DPA	Pengelola Data Perencanaan
		2. Data RKA Per Bidang / Bagian	Dokumen		2 Dokumen RKA	- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
		3. Data DPA	Dokumen		2 Dokumen DPA	- Dokumen Perjanjian Kinerja - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Laporan LPPD	
		4. Data Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Per Bidang / Bagian	Dokumen		1 Dokumen RKT	- Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	
		5. Data Perjanjian Kinerja Per Bidang / Bagian	Dokumen		1 Dokumen Perjanjian Kinerja DPMPD		
		6. Data Capaian Kinerja Per Bidang / Bagian	Dokumen		4 Laporan Kinerja Triwulan		
		7. Dokumen LPPD	Dokumen		1 Dokumen LPPD		
		8. Data Evaluasi Renja Per Bidang / Bagian	Dokumen		4 Laporan Evaluasi Renja		
		9. Data Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Dokumen		1 Dokumen RUP		
		10. Dokumen LKjIP			1 Dokumen LKjIP		
2.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Masyarakat Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur	1. Data Program/Kegiatan per Bidang	Dokumen	Mengukur Jumlah Data yang menjadi bahan membuat Laporan / Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Laporan	- Paparan Materi per Bidang - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Pengelola Data Perencanaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH : Provinsi Kalimantan Timur
 JABATAN : Kepala Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan
 TUGAS :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan kelurahan
 b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan kelurahan
 c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan administrasi desa dan kelurahan
 d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa dan kelurahan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 FUNGSI :
 a. Merencana kegiatan seksi kapasitas desa berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan seksi kapasitas desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas
 c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan
 d. Memeriksa dan monitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan
 e. Memeriksa dan monitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan
 f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kerjasama desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 g. Menghimpun dan menyusun pedoman perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan
 i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kelembagaan, kerjasama dan kapasitas desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah
 j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kapasitas desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
 k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan
 l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih 2. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa yang berhasil dilatih	1. Untuk mewujudkan Aparatur Desa yang mampu memahami penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Untuk mewujudkan Badan Permusyawaratan Desa yang mampu memahami penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan pelatihan peningkatan kapasitas dari target renstra DPMPD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 - 2023 sebanyak 150 Desa dari penilaian IDM kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal	Koordinator Wilayah Satuan Kerja P3MD Kementerian Desa PDTT

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan

: **Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat**

Tugas

: Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha ekonomi masyarakat.

Fungsi

- : - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian binapotensi Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya data perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah perkembangan Badan Usaha Milik desa dan Pasar Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur	- Kabupaten
	Jumlah pasar Desa yang aktif	Jumlah pasar desa yang melaksanakan aktivitas jual beli	
Tersedianya rumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah bahan rumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat	- Regulasi - Surat Masuk - Kajian Akademis

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2

1. Jabatan

2. Tugas

- Kepala Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan
1. Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan
 2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan seksi
 3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan dan penilaian.
 4. Memfasilitasi Serah Terima Mahasiswa KKN Ummul dan Perguruan tinggi lainnya
 5. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KKN
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN maupun pasca KKN
 7. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan kerjasama prasarana dan sarana energi baru dan terbarukan yg proposional, dan efektif
 8. Melakukan pemetaan, inventarisasi dan pembinaan prasarana dan sarana Desa dan Kelurahan 10 Kabupaten/Kota
 9. Menghimpun dan menyusun data pembentukan dan pembinaan Kelompok Pengelola -Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (KP-SPAM) PAMSIMAS
 10. Melakukan pembinaan kepada KP-SPAMS PAMSIMAS
 11. Melakukan pembinaan kepada Asosiasi KP-SPAMS PAMSIMAS
 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana desa dan kelurahan
 13. Mengidentifikasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan seksi pendayagunaan prasarana dan sarana desa dan kelurahan
 14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pendayagunaan prasarana dan sarana desa dan kelurahan berdasarkan rencana kerja
 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

3. Indikator Kinerja Individu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Alasan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penar Ja
1	Meningkatnya kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemantauan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Air Minum dan pengolahan sanitasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berhasil memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Pokmas	Pembentukan Pokmas Berdasarkan Surat Mendagri No. 413.5/1884/SJ/ tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Fasilitas Umum di lingkungan Permukiman masyarakat dan diindakijuti dengan Surat Gubernur Kalimantan Tahun 2012 dan 2015. Dan Surat Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dan kebijakan dari Kemendes tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (KP-SPAMS PAMSIMAS) TAHUN 2012	Jumlah Kelompok Masyarakat/Kelompok Pengelola-Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (KP-SPAMS PAMSIMAS) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah	Laporan perkembangan dan pembentukan dari Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Per Prasarana dan Sa Kelurahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2. **TUGAS** : Pengumpulan Data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
3. **Fungsi** :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - b. Penyiapan Bahan Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian, dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - d. Penyiapan Bahan Pembinaan, pengendalian, dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - e. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Masyarakat Desa, MHA Kabupaten	Masyarakat Hukum Adat yang dibina		7 Kab dilakukan identifikasi keberadaan MHA yang terbina	Kabupaten

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
2. **TUGAS** : Pengumpulan Data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
3. **Fungsi** :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - b. Penyiapan Bahan Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian, dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - d. Penyiapan Bahan Pembinaan, pengendalian, dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - e. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya partisipasi masyarakat	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	Meningkatnya Swadaya dan gotongroyong masyarakat	10 Kabupaten/Kota melaksanakan BBGRM mulai dari desa dan kelurahan	Kabupaten / Kota
	PKK yang dibina	Meningkatnya peran PKK	10 Kabupaten/Kota meningkatnya peran dari PKK	Kabupaten/Kota
	LPM yang dibina	Meningkatnya peran LPM	Kabupaten Kota yang meningkatnya peran dari LPM	Kabupaten/Kota
	Posyandu yang dibina	Meningkatnya peran Posyandu	meningkatnya peran dari 6 Posyandu Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota

**PENGUKURAN KINERJA
(REALISASI)**

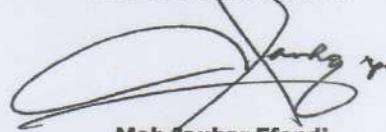
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	15	14	93.33%
		Persentase BUMDesa Aktif	%	2,9	2,9	100
		Persentase Desa dengan status berkembang	%	2,9	2,9	100
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	%	2,9	2,9	100
		Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	2,9	2,9	100
		Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim		-	-	-

Samarinda, Januari 2020

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur



Moh Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 Bidang/Bagian : Sekretariat
 Tahun : 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	98	98	100
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	98	98	100
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	80	80	100
4	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80	80	100
5	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan hasil-hasil evaluasi program pembangunan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	80	80	100
6	Meningkatnya keterpaduan kebijakan dan program pembangunan masyarakat	Terciptanya keserasian kebijakan Program/Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80	80	100
7	Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	2,9	2,9	100

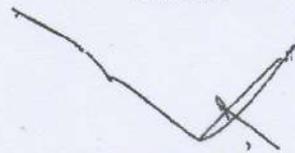
Samarinda, Januari 2020

Kepala
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Pemerintahan Desa
 Provinsi Kalimantan Timur



Moh. Jauhar Efendi
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19611216 198603 1 014

Sekretaris



Surono, M.Si
 Pembina
 NIP. 19660119 199903 1 003

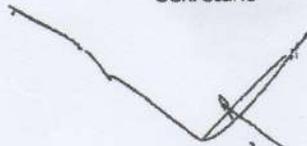
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 Bidang/Bagian : Sekretariat
 Subbid/Subbag : Perencanaan Program
 Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pealopran kinerja DPMPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1	1	100
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	1	100
		Laporan hasil update data perencanaan	2	2	100
		Laporan hasil penyusunan bahan perencanaan	6	6	100
2	Meningkatnya koordinasi dan monitoring bagian perencanaan program	Laporan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1	1	100
		Laporan hasil dialog interaktif/siaran perdesaan	2	2	100
3	Keterpaduan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1	1	100

Samarinda, Januari 2020

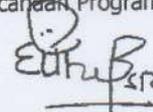
Sekretaris



Surono, M.Si

NIP. 19660119 199903 1 003

Kepala Subbag
Perencanaan Program



Esthi Susila Rini, SP, M.Si

NIP. 19720107 199703 2 004

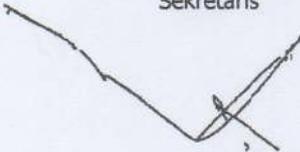
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Sekretariat
Subbid/Subbag : Umum
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	12	100
2	Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	12	12	100
3	Kegiatan dan waktu pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerah serta penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah, jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	75	75	100
			12	12	100

Samarinda, Januari 2020

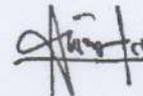
Sekretaris



Surono, M.Si

NIP. 19660119 199903 1 003

Kepala Subbag
Umum



Vincentius Samadi PP, S.STP

NIP. 19810927 200012 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memperoleh pembinaan	2,9	2,9	100
		Tertelaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	80	80	100

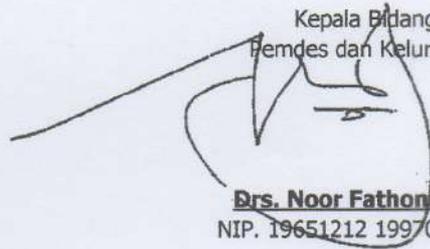
Samarinda, Januari 2020

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur



Moh. Jauhar Efendi
NIP. 19611216 198603 1 014

Kepala Bidang
Pemdes dan Kelurahan



Drs. Noor Fathoni, M.Si
NIP. 19651212 199703 1 003

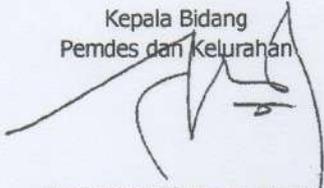
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Subbid/Subbag : Kapasitas Desa dan Kelurahan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa	Data Aparatur Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas	80	80	100

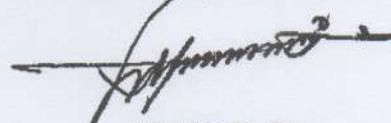
Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Pemdes dan Kelurahan



Drs. Noor Fathoni, M.Si
NIP. 19651212 199703 1 003

Kepala Seksi
Kapasitas Desa dan Kelurahan



Huzaimah, SP
NIP. 19630512 200012 2 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Sekretariat
Subbid/Subbag : Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	Desa dan Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi melalui perlombaan Desa dan Kelurahan	3	3	100
		Desa berprestasi tingkat Provinsi melalui perlombaan cerdas cermat Desa	3	3	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Permdes dan Kelurahan

Drs. Noor Fathoni, M.Si

NIP. 19651212 199703 1 003

Kepala Seksi
Penataan Administrasi Desa
dan Kelurahan

Nazly, S.PI

NIP.19680223 199703 2 003

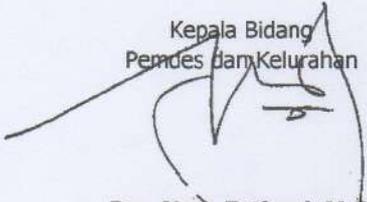
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Subbid/Subbag : Kewenangan Keuangan Aset Desa
Tahun : 2019

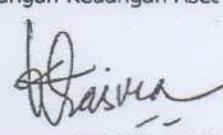
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7
1	Tersusunnya laporan data penyaluran keuangan desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa	80	80	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Pendes dan Kelurahan


Drs. Noor Fathoni, M.Si
NIP. 19651212 199703 1 003

Kepala Seksi
Kewenangan Keuangan Aset Desa


Kasmawati, S.TP, M.Si
NIP. 19800510 199810 2 002

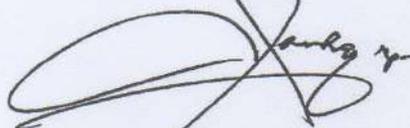
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase dengan status berkembang	2,9	2,7	93,33
		Pembangunan Desa dan Perdesaan berbasis pemberdayaan yang optimal	80	80	100

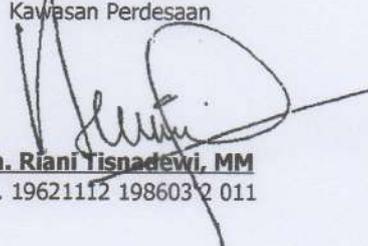
Samarinda, Januari 2020

Kepala
DPMPD Prov.Kaltim



Moh. Jauhar Efendi
NIP. 19611216 198603 1 014

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan



Dra. Riani Tisnadewi, MM
NIP. 19621112 198603 2 011

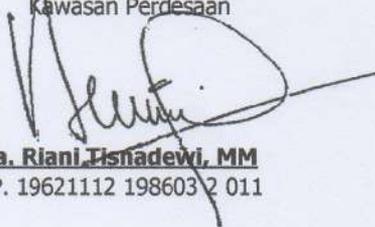
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Subbid/Subbag : Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	1	1	100
		Tersedianya Data IDM	1	1	100
		Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan	1	1	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan



Dra. Riani Tisnadewi, MM
NIP. 19621112 198603 2 011

Kepala Seksi
Pengembangan Informasi
Desa dan Kelurahan



Isnawati, SP, M.Si
NIP. 19740124 199703 2 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Subbid/Subbag : Pembangunan Desa
Tahun : 2019

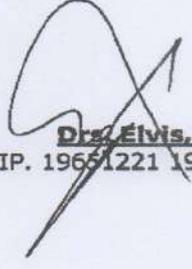
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten yang dibina dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Kabupaten yang dibina	5	5	100
2	Meningkatnya Kapasitas Pendamping Desa	Pendamping Desa yang dibina	50	50	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan


Dra. Riani Tisnadewi, MM
NIP. 19621112 198603 2 011

Kepala Seksi
Pembangunan Desa


Drs. Elvis, M.Si
NIP. 19651221 198609 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Subbid/Subbag : Pembangunan Kawasan Perdesaan
Tahun : 2019

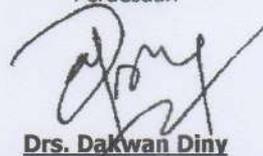
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan dan Pengembangan Pembangunan Antar Desa	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Pembangunan Antar Desa	1	1	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan


Dra. Riani Tisnadewi, MM
NIP. 19621112 198603 2 011

Kepala Seksi
Pembangunan Kawasan
Perdesaan


Drs. Dakwan Diny
NIP. 19681028 199003 1 010

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 Bidang/Bagian : Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 Tahun : 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	LK Desa/Kelurahan, Masyarakat Desa/Kelurahan, Aparatur Desa/Kelurahan, Masyarakat Desa, MHA Kab/Kota	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	35	35	100
		Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	2,9	2,9	100
2	TP.PKK Kab/Kota, TP PKK/Kader PKK, Kader PKK /Keluarga, Kader PKK dan Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80	80	100

Kepala
DPMPD Prov.Kaltim



Moh. Jauhar Efendi
NIP. 19611216 198603 1 014

Kepala Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosbudmasy



Ir. H. Surya Dharma Herman, M.Si
NIP. 19630625 199003 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
Subbid/Subbag : Pengembangan Kapasitas Masyarakat
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat Desa/Kelurahan, Aparatur Desa/Kelurahan Kabupaten Kota	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	150	150	100

Kepala Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosbudmasy



Ir. H. Surya Dharma Herman, M.Si
NIP. 19630625 199003 1 004

Kepala Seksi
Pengembangan Kapasitas
Masyarakat



Helvin Syahrudin, M.Si
NIP. 19710527 199002 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
Subbid/Subbag : Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat Desa, MHA Kab/Kota	Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	5	5	100

Kepala Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosbudmasy



Ir. H. Surya Dharma Herman, M.Si
NIP. 19630625 199003 1 004

Kepala Seksi
Ketahanan dan Sosbudmasy



Mahdi Hamid, SE
NIP. 19630715 200212 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
Subbid/Subbag : Pemberdayaan Kelembagaan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM	10	10	100
		Jumlah PKK yang dibina	10	10	100
		Jumlah LPM yang dibina	10	10	100
		Jumlah Posyandu yang dibina	6	6	100
2	TP.PKK Kabupaten/Kecamatan	Jumlah TP.PKK yang dibina	130	130	100
3	TP.PKK/Kader PKK	Kader PKK yang dilatih	150	150	100
4	Kader PKK/Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	160	160	100
5	Kader PKK/Masyarakat	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	300	300	100

Kepala Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosbudmasy

Ir. H. Surya Dharma Herman, M.Si
NIP. 19630625 199003 1 004

Kepala Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan

Ir. Evda Prassintaningrum
NIP. 19650328 199703 2 001

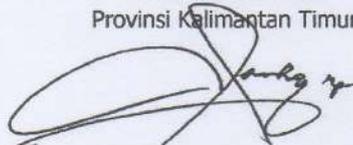
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 Bidang/Bagian : Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 Tahun : 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi	18	18	100
2	Masyarakat Miskin Perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan TTG dan penguatan kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat	Posyantek percontohan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan TTG	10	10	100
3	Terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa/Kampung	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	15	15	100
		Persentase Bumdes Aktif	2,9	2,9	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Pemerintahan Desa
 Provinsi Kalimantan Timur



Moh. Jauhar Efendi
 NIP. 19611216 198603 1 014

Kepala Bidang
 UEM, SDA dan TTG



Rusniati, SE, M.Si
 NIP. 1651016 198601 2004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Subbid/Subbag : Usaha Ekonomi Masyarakat
Tahun : 2019

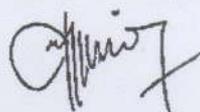
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	5	6	7
1	Terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa/Kampung	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Kampung yang terbentuk	1	1	100
2	Tersedianya rumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat.	Jumlah Dokumen rumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat	1	1	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
UEM, SDA dan TTG


Rusniati, SE, M.Si
NIP. 1651016198601 2004

Kepala Seksi
Usaha Ekonomi Masyarakat


Muriyanto, S.STP
NIP. 1982035 200112 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Subbid/Subbag : Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna
Tahun : 2019

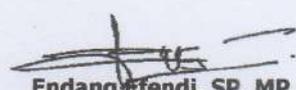
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat miskin perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan TTG dan penguatan kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat	Posyantek percontohan yang dibina	10	10	100
2	Lembaga Pos Pelayanan Tekonologi/Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Posyantek yang aktif	18	18	100

Samarinda, Januari 2020

Kepala Bidang
UEM, SDA dan TTG


Rusniati, SE, M.Si
NIP. 1651016 198601 2004

Kepala Seksi
Pendayagunaan SDA dan TTG


Endang Efendi, SP, MP
NIP. 19630928 198601 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Bidang/Bagian : Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Subbid/Subbag : Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Mahasiswa KKN Unmul Samarinda di Desa/Kelurahan 10 Kab/Kota	Jumlah Mahasiswa KKN	300	300	100
2	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Desa/kelurahan Kab/Kota	Jumlah Alat TTG untuk pengelolaan Air Bersih	10	10	100
		Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Sanitasi	10	10	100

RENCANA AKSI

